

EXECUTIVE SUMMARY INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016



EXECUTIVE SUMMARY

PEMERINTAH KOTA SUBABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

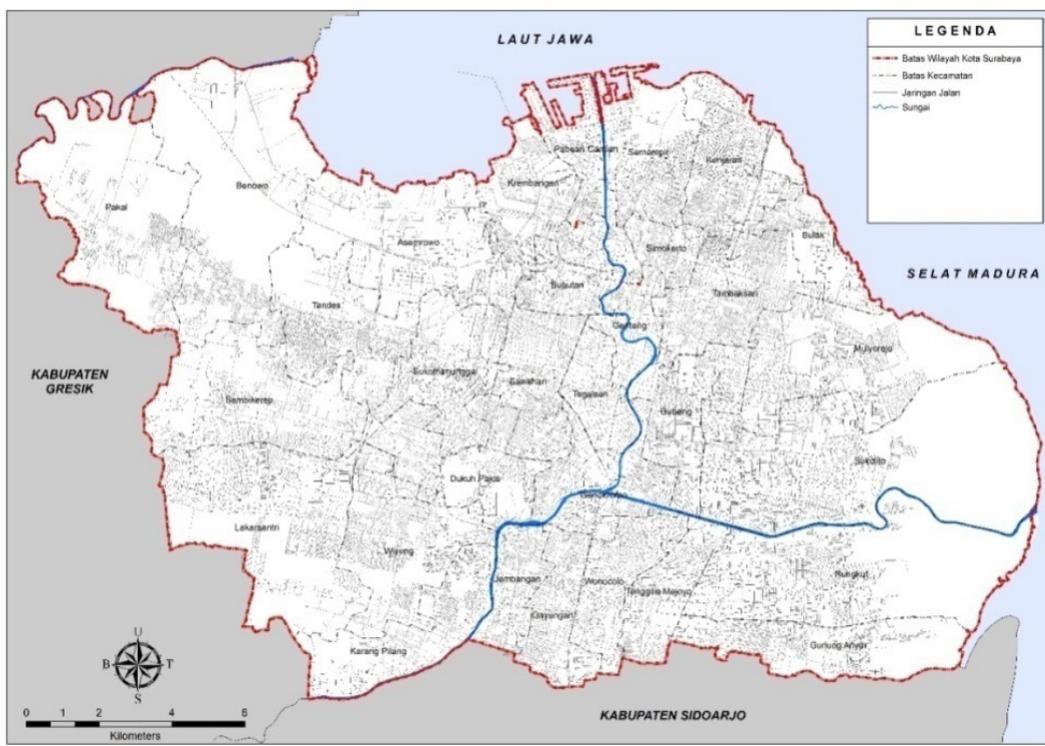


A. Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat

Kota Surabaya adalah Ibukota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang menjadi pusat kegiatan komersial, finansial, perdagangan, informasi, administrasi, sosial, dan kesehatan. Kota Surabaya menjadi wilayah strategis yang mampu menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur. Perkembangan Kota Surabaya yang sangat cepat dipicu oleh dinamika dan aktivitas kota yang

sangat tinggi. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan bermanfaat. Hal tersebut sesuai dengan visi Kota Surabaya yaitu mewujudkan Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi.

Kota Surabaya sendiri memiliki luas wilayah sebesar 33.451,14 Ha, yang secara administratif terbagi dalam 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Berikut adalah peta administratif Kota Surabaya :



Gambar 1. Peta Administratif Kota Surabaya

Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga akhir tahun 2016 sebesar 3.016.653 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun sebelumnya (2015) sebesar 2,49% atau sebesar 73.373 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk tersebut terjadi akibat peningkatan angka kelahiran dan juga jumlah penduduk yang datang ke Surabaya. Kenaikan jumlah penduduk dan pesatnya kegiatan perekonomian di Surabaya mengakibatkan tingginya aktivitas perkotaan sehingga turut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.



Salah satu upaya untuk mengetahui kondisi perubahan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya yaitu dengan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Manfaat dokumen ini adalah untuk memberikan data dan informasi aktual serta analisis kondisi lingkungan hidup yang merupakan capaian hasil kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Isu Prioritas

Tata cara penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2017 sesuai surat Setjen KLHK No. S.156/setjen/DATIN/set.0/2/2017 yang menjelaskan bahwa dalam proses penetapan isu prioritas harus dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Proses tersebut juga wajib menggunakan pendekatan *Pressure – State – Response* (PSR).

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup dalam dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut terbagi atas tahapan penjaringan awal isu prioritas serta proses analisis PSR oleh tim penyusun IKPLHD. Proses penjaringan awal isu prioritas ditinjau dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tahapan selanjutnya adalah rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan narasumber dari perguruan tinggi

ditinjau berdasarkan analisa data kondisi eksisting dari tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan.

Mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dirumuskanlah isu-isu prioritas lingkungan hidup Kota Surabaya. Adapun isu prioritas lingkungan hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Lindung yang Terintegrasi dengan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Pelestarian Air Untuk Keberlanjutan Ekologi;
3. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Sumber Pencemar Guna Menjaga Kualitas Udara;
4. Optimalisasi Sistem Penanggulangan Bencana Perkotaan;
5. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan Secara Terpadu Berbasis Peran Serta Masyarakat.

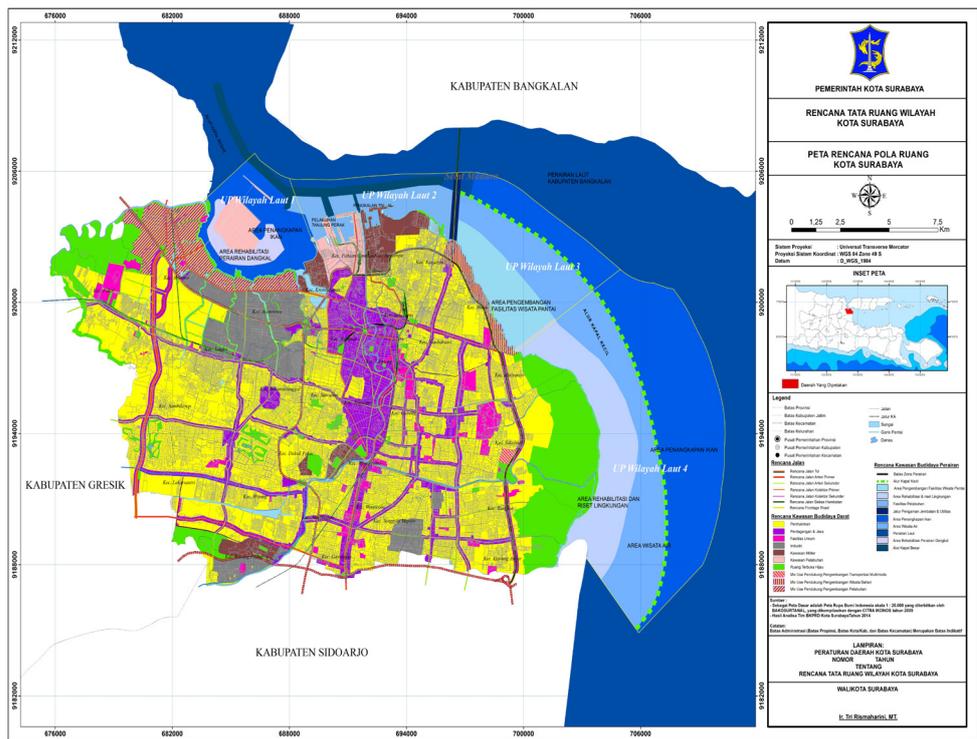
C. Analisis *Pressure-State-Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

a. Tata Guna Lahan

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Surabaya dalam tiga tahun terakhir mempengaruhi peningkatan luasan kawasan terbangun. Baik permukiman, industri, fasilitas umum maupun perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Sejalan dengan tujuan penataan ruang Kota Surabaya sebagai kota berbasis perdagangan dan jasa, tahun 2016 jenis penggunaan lahan tersebut mengalami peningkatan luasan paling besar.

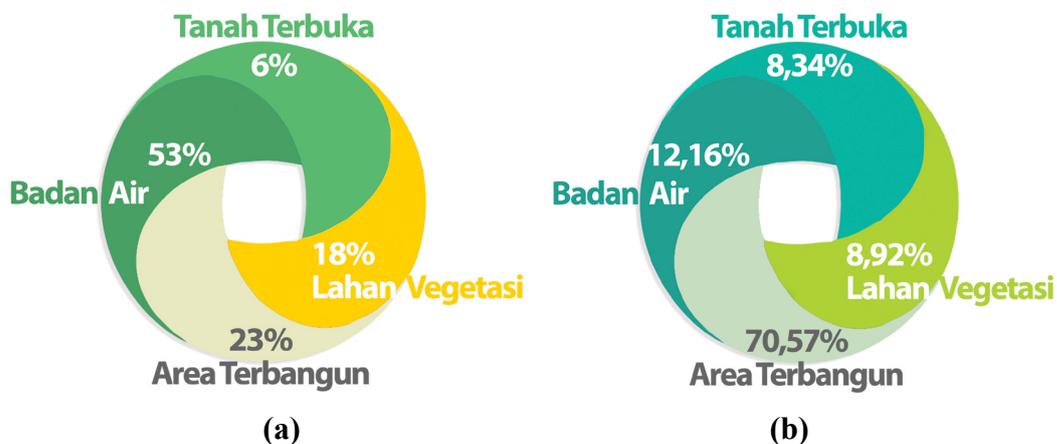


INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang RTRW

Mengacu Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034, rencana pola ruang terbagi kedalam kawasan lindung dan budidaya. Persentase luasan eksisting kawasan lindung adalah $\pm 40,13\%$ dan kawasan budidaya $\pm 59,87\%$. Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung wilayah laut. Sedangkan kawasan budidaya terbagi menjadi fasilitas umum, kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, kawasan industri dan pergudangan, kawasan militer, kawasan pengembangan pelabuhan, kawasan pendukung pengembangan wisata bahari, dan kawasan *mix use* permukiman dan fasilitas umum.



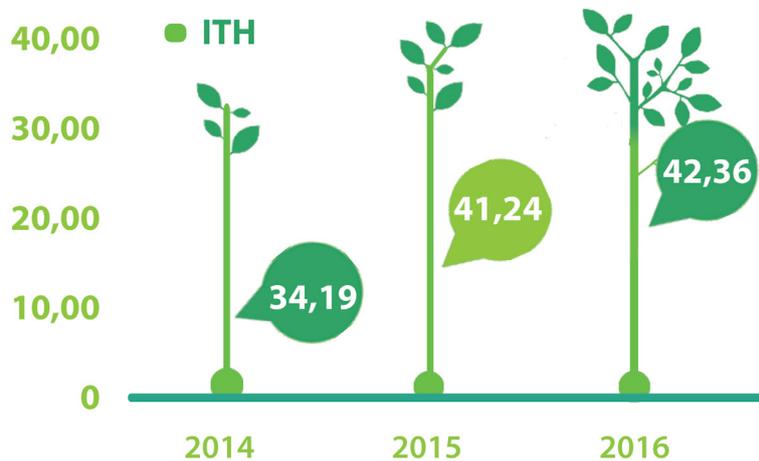
Gambar 3. (a) Persentase Tutupan Lahan Kawasan Lindung; (b) Persentase Tutupan Lahan Kawasan Budidaya



Menyadari perkembangan kota yang masih terus berlanjut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Penyusunan dokumen rencana tata ruang sebagai landasan pembangunan diharapkan mampu mengendalikan alih fungsi lahan secara sporadis. Kebijakan hunian vertikal dalam dokumen rencana tata ruang merupakan salah satu upaya mengatasi keterbatasan ketersediaan lahan. Peningkatan pengawasan penggunaan lahan melalui penerbitan ijin adalah upaya lanjutan setelah perencanaan

tersebut dibuat.

Program-program lain yang terkait tata guna lahan seperti penghijauan, pembangunan RTH dan penanaman mangrove berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas ruang hijau yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis di Kota Surabaya. Ditinjau dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) dimana perhitungannya mengacu pada luasan hutan, nilai ITH tahun 2016 mencapai 42,36 dimana nilai tersebut lebih besar 1,12 poin dari tahun 2015.



Gambar 4. Nilai Indeks Tutupan Hutan Kota Surabaya 2014-2016

b. Kualitas Air

Sumber daya air di Kota Surabaya terdiri dari air sungai, air laut, air waduk/boezem, dan air tanah (air sumur). Kualitas sumber daya air tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk sekaligus aktivitas yang dilakukan baik dari pusat kota hingga kawasan pesisir. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Surabaya disediakan oleh PDAM yang diambil dari Kali Surabaya dan sebagian dari sumber air Umbulan, Pasuruan. Kenaikan jumlah pelanggan PDAM setiap tahunnya secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan kuantitas pengambilan sumber air baku tersebut. Selain itu keberadaan permukiman harus disertai dengan pemenuhan akses sanitasi layak, karena dapat mempengaruhi kualitas air di sekitarnya.

Kota Surabaya memiliki enam sungai utama, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, Kali Lamong dan Kali Perbatasan. Adapun tiga diantaranya (Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo) melintasi pusat Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai diketahui bahwa nilai





Indeks Pencemaran Air (IPA) dari tahun 2015 naik sebanyak 2,773 poin dari 52,13 menjadi 54,9 di tahun 2016.



Gambar 5. Nilai Indeks Pencemaran Air Kota Surabaya 2014-2016

Hal tersebut terlihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai kelas II dan sebagian sungai kelas III yang telah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air. Meskipun pemenuhan sumber air bersih berasal dari PDAM, Pemerintah Kota Surabaya tetap memberikan perhatian terhadap kualitas air sumur dengan melakukan monitoring dan uji sampling kualitas air sumur secara berkala. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa sebagian besar kualitas air sumur telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sesuai Permenkes No 492 Tahun 2010.

Selain sungai, Kota Surabaya memiliki 19 waduk dan 17 boezem yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Secara umum pemanfaatan waduk/boezem adalah sebagai penampungan air dan sebagian untuk budidaya perikanan, sehingga dilakukan pemantauan/ monitoring kualitas air boezem tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa sebagian besar parameter telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Perkembangan permukiman di wilayah pesisir yang semakin pesat, secara tidak langsung mempengaruhi kualitas air laut. Monitoring kualitas air laut juga dilakukan setiap triwulan pada tiga lokasi pemantauan yaitu kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, dan kawasan biota laut. Berdasarkan hasil monitoring, diketahui bahwa kualitas air laut pada kawasan wisata bahari dan pelabuhan sebagian besar telah memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Dalam upaya pengelolaan kelestarian air, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, pengawasan dan monitoring kualitas air, kegiatan patroli air, monitoring IPAL komunal, penerbitan dan pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), pengawasan terhadap kegiatan usaha penghasil limbah, kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan masyarakat, dan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) yang memperbaiki sarana sanitasi rumah tangga.

c. Kualitas Udara

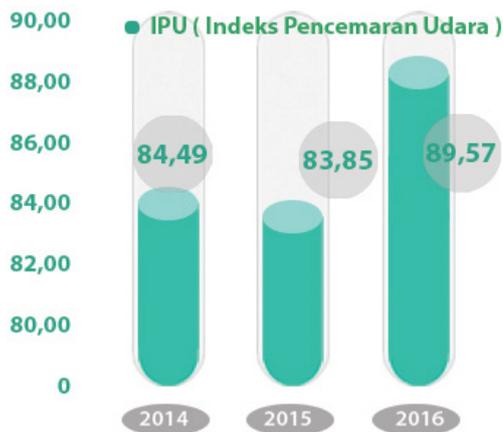
Perekonomian Kota Surabaya ditunjang oleh kegiatan-kegiatan, seperti industri, perdagangan, komersial, dan jasa. Kawasan-kawasan pusat perekonomian tersebar di seluruh wilayah Surabaya, menyebabkan mobilitas yang tinggi baik dari jumlah kendaraan bermotor yang masuk maupun yang keluar dari Kota Surabaya. Selain hal tersebut, kegiatan industri juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas udara ambien di Kota Surabaya.



EXECUTIVE SUMMARY



Dalam upaya pengawasan dan monitoring udara ambien, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien pada area transportasi, industri, perkantoran, permukiman, perbelanjaan dan area sekolah, meliputi parameter SO_2 , CO , NO_2 , O_3 , HC , PM_{10} , $PM_{2,5}$, TSP, Pb, Dustfall, Total Fluorides, Fluor Index, Khloline & Khloline Dioksida serta Sulphat Index. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara (IPU) adalah konsentrasi NO_2 dan SO_2 , dimana pada tahun 2016 nilai IPU meningkat 5,72 poin dari tahun 2015, menjadi 89,57 poin.



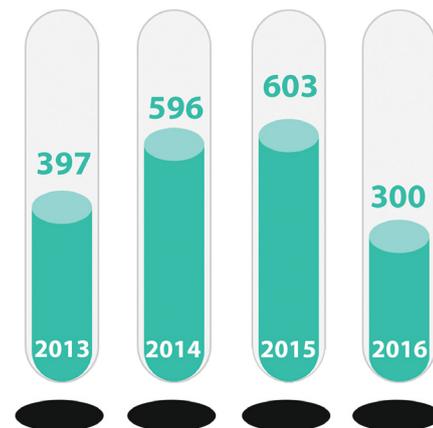
Gambar 6. Indeks Pencemaran Udara Kota Surabaya 2014-2016

Udara yang berkualitas dan layak hirup adalah kebutuhan dan hak dasar manusia, oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya berupaya melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan menjaga kualitas udara, seperti penyelenggaraan hutan kota, jalur hijau, penanaman pohon, penghijauan, pembangunan jalan *frontage*, *ring road*, revitalisasi pedestrian, pengaplikasian teknologi *Addaptive Traffic Control*

System (ATCS), pengadaan angkutan umum, pengujian emisi kendaraan bermotor, penyediaan angkutan massal cepat, *non motorize transport*, kegiatan *car free day* (CFD), penanganan kasus pencemaran udara, monitoring udara ambien (AQMS dan non AQMS), serta udara emisi industri.

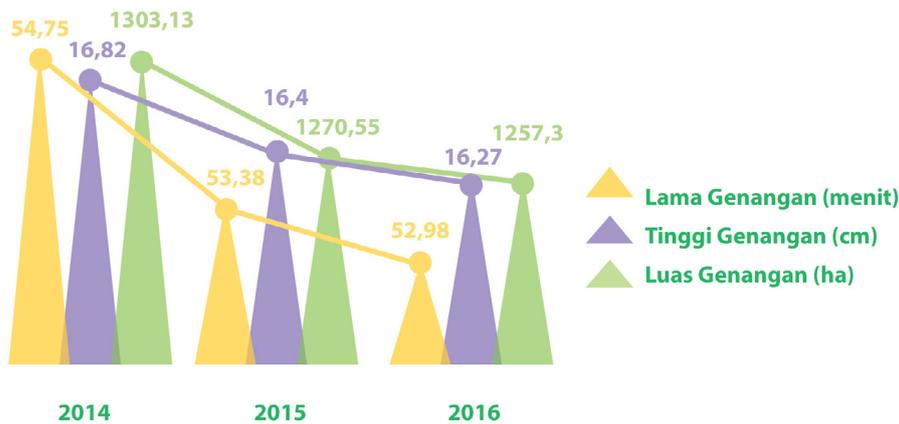
d. Resiko Bencana

Kota Surabaya merupakan Kota metropolitan dengan rata-rata kepadatan bangunan termasuk dalam klasifikasi tinggi, dimana dalam tiap hektarnya berdiri lebih dari 50 unit bangunan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya potensi genangan dan kebakaran. Dalam penanganan daerah tergenang, Kota Surabaya dibagi ke dalam lima rayon sistem drainase. Setiap sistem drainase melayani cakupan wilayah tertentu yang terdiri atas Rayon Wiyung, Rayon Tandes, Rayon Genteng, Rayon Jambangan, dan Rayon Gubeng. Untuk kawasan rawan genangan di Surabaya berada di sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran diversi Gunung Sari, dan kawasan pantai timur Surabaya. Sedangkan untuk daerah



Gambar 7. Jumlah Kebakaran Kota Surabaya 2013-2016





Gambar 8. Grafik Lama, Tinggi dan Luas Genangan di Kota Surabaya Tahun 2014-2016

Pemerintah Kota Surabaya melalui instansi-instansi pemerintahan terkait berupaya melaksanakan penanganan bencana genangan diantaranya pembangunan saluran drainase, pembangunan *box culvert*, optimalisasi fungsi badan air, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana pematuan. Sedangkan upaya pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran diantaranya meliputi pelatihan kepada masyarakat dan pelajar terkait penanganan kebakaran, penambahan jumlah sumur kebakaran dan rumah pompa, penanganan bencana kebakaran dengan penerapan *fast response* terhadap pelaporan kebakaran, pendataan dan pengawasan terhadap kelayakan peralatan kebakaran pada pelaku usaha yang dilakukan setiap tahun, peningkatan infrastruktur penanggulangan pemadam kebakaran, pos jaga aktif dan sarana penunjangnya, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta peningkatan kemampuan personil.

e. Perkotaan

Seperti yang telah diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk

dan pesatnya kegiatan perekonomian di Surabaya berperan terhadap banyaknya jumlah timbulan sampah. Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya pereduksian sampah, diantaranya penerapan teknologi 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembangunan rumah kompos, tempat pengolahan sampah terpadu (super depo Sutorejo dan PDU Jambangan), serta pemberdayaan bank sampah oleh masyarakat. Hasil pereduksian sampah dari proses 3R sebesar 73,63 ton/hari, pereduksian dari rumah kompos sebesar 964,98 ton/hari, super depo sutorejo dan PDU jambangan sebesar 10 ton/hari, serta jumlah reduksi dari bank sampah sebanyak 0,55 ton/hari, sehingga sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo yang sebelumnya sebanyak 2.913.181,80 kg/hari turun menjadi 1.571.619,3 kg/hari, yang kemudian diolah menggunakan sistem pengolahan *Sanitary Landfill System* dan mampu menghasilkan listrik sebesar 2 MW. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya dalam proses pembangunan instalasi gasifikasi yang mampu menghasilkan listrik berkapasitas 8,31 MW dengan menggunakan teknologi *Zero Waste*. Selain gasifikasi di TPA Benowo, Pemerintah Kota Surabaya



sudah menerapkan sistem gasifikasi di rumah kompos Bratang dan Wonorejo

D. Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan komponen-komponen lingkungan hidup. Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan penggunaan sumber daya alam harus selaras serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Untuk itu perlu upaya / inovasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut. Pemerintah Kota Surabaya berupaya melakukan peningkatan kapasitas lembaga daerah melalui pengembangan jejaring kerja, penerbitan produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup, transparansi dan akuntabilitas kepada

publik salah satunya berupa program *Surabaya Single Window* (SSW) yang merupakan sebuah sarana terintegrasi terkait segala proses perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ditinjau dari segi anggaran, alokasi untuk pengelolaan lingkungan hidup mencapai 26,65% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Berikut adalah beberapa inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan lingkungan hidup :

a) Pemisahan Saluran Air Limbah dan Air Hujan



Gambar 9. Saluran Terpisah antara Air Limbah dan Air Hujan

b) Pembangunan *Box Culvert*



Gambar 10. Pembangunan *Box Culvert*

c) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)



Gambar 11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kota Surabaya



d) Pemeliharaan Kebersihan Kota



Gambar 12. Truk *Compactor* yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya

e) Pengelolaan Sampah Terpadu dan Pemanfaatan Menjadi Energi



Gambar 13. Super Depo Sutorejo dan PDU Jambangan



Gambar 14. Rumah Kompos dan Gasifikasi Sampah Ranting dan Anorganik



Gambar 15. Instalasi *Landfill Gas*





f) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya



Gambar 16. Pembangkit Tenaga Surya di Gedung Pemerintahan Kota Surabaya

g) Program Lomba Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan



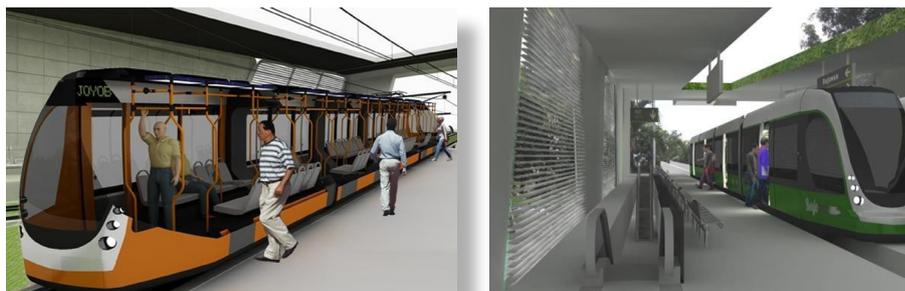
Gambar 17. Surabaya Green And Clean

g) Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan dan Energi Terbarukan



Gambar 18. Sosialisasi Potensi Minyak Jelantah untuk Biofuel

h) Angkutan Massal Cepat



Gambar 19. Visualisasi Jenis Angkutan Massal Cepat di Kota Surabaya



i) Non Motorize Transport



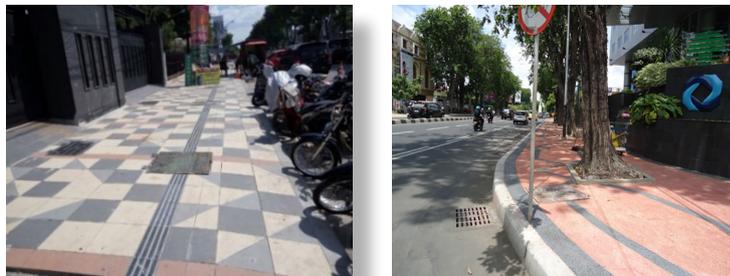
Gambar 20. Jalur Sepeda di Kota Surabaya

j) Car Free Day



Gambar 21. Kegiatan Car Free Day di Jalan Raya Darmo

k) Revitalisasi Pedestrian



Gambar 22. Revitalisasi Pedestrian di Beberapa Ruas Jalan di Surabaya

l) Kampung Wisata



Gambar 23. Kampung Wisata di Kota Surabaya

Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a) Pembentukan fasilitator dan kader lingkungan, pada tahun 2016 jumlah fasilitator lingkungan sebanyak 540 orang dan kader lingkungan yang berjumlah 29.700 orang. Adapun kegiatan yang dipelopori oleh fasilitator dan kader lingkungan adalah kerja bakti, kegiatan penghijauan lingkungan sekitar, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pengolahan air limbah rumah tangga dengan IPAL Komunal, *urban farming* dan partisipasi dalam program Unggulan Kota Surabaya yaitu, Merdeka Dari Sampah dan Surabaya Green and Clean, sehingga menghasilkan berbagai penghargaan baik tingkat kota maupun nasional.



Gambar 24. Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan oleh Kader Lingkungan Kota Surabaya



Gambar 25. Bank Sampah di Kota Surabaya

- b) Kegiatan lingkungan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meliputi kegiatan penanaman pohon, pengeboran lubang biopori, penyebaran bibit ikan di Kali Surabaya, pemantauan kualitas sungai, dan sosialisasi terkait lingkungan hidup.
- c) Kegiatan Bank Sampah, Kota Surabaya memiliki bank sampah yang menjadi induk dari bank sampah lainnya, yaitu Bank Sampah Bina Mandiri yang sekarang berganti nama menjadi Bank Sampah Induk Surabaya yang melayani 28 Kecamatan dari 31 Kecamatan. Bank Sampah Induk Surabaya mempunyai 205 Unit Bank Sampah Binaan termasuk sekolah dan lembaga. Sampai saat ini tercatat sudah terdapat 240 bank sampah dengan total nasabah sebanyak 13.561 orang di Surabaya.



D. Kesimpulan

1. Terdapat 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup Kota Surabaya, yaitu:
 - a. Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Lindung yang Terintegrasi dengan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. Pelestarian Air Untuk Keberlanjutan Ekologi;
 - c. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Sumber Pencemar Guna Menjaga Kualitas Udara;
 - d. Optimalisasi Sistem Penanggulangan Bencana Perkotaan;
 - e. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan Secara Terpadu Berbasis Peran Serta Masyarakat.
2. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Surabaya terkait isu prioritas “Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Lindung yang Terintegrasi dengan Pembangunan Berkelanjutan” dapat ditinjau salah satunya dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) dimana Pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan nilai ITH tahun 2015 yang hanya sebesar 41,24 menjadi 42,36 pada tahun 2016.
3. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Surabaya terkait isu prioritas “Pelestarian Air Untuk Keberlanjutan Ekologi” dapat ditinjau salah satunya dari peningkatan Indeks Pencemaran Air (IPA) dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan nilai IPA tahun 2015 yang hanya sebesar 52,13 menjadi 54,9 pada tahun 2016.
4. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Surabaya terkait isu prioritas “Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Sumber Pencemar Guna Menjaga Kualitas Udara” dapat ditinjau salah satunya dari peningkatan Indeks Pencemaran Udara (IPU). Nilai IPU Kota Surabaya selalu diatas 80 ditambah dengan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya nilai IPU tahun 2016 meningkat 5,72 poin menjadi 89,57 dari tahun 2015.
5. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Surabaya terkait isu prioritas “Optimalisasi Sistem Penanggulangan Bencana Perkotaan” untuk bencana kebakaran dapat ditinjau dari berkurangnya kejadian kebakaran tahun 2016 sebanyak 300 kejadian serta meningkatnya *Fast Response* terhadap pelaporan kejadian kebakaran. Terkait permasalahan genangan, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil menurunkan lama, tinggi dan luas genangan dibanding Tahun 2015.
6. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Surabaya terkait isu prioritas “Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan Secara Terpadu Berbasis Peran Serta Masyarakat” dapat ditinjau dari upaya pemerintah dalam hal pengurangan sampah di sumber melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*), bank sampah, rumah kompos dan pusat daur ulang sampah. Jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Benowo yang awalnya sebesar 2.913.181,80 kg/hari turun menjadi 1.571.619,3 kg/hari.



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Jl. Jimerto No. 25-27, Surabaya (60272) - Jawa Timur
(031) 5312144 ext 290,513 <http://lh.surabaya.go.id>